



DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
KOTA BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2024



[pupr_kotablit](#)



[Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama periode akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan sekaligus Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar**

Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Didalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan diantaranya peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dan berkelanjutan, penguatan sistem drainase dan jalan, dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2024, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menguraikan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 11 (sebelas) sasaran yang sudah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran 1, yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari target **88.42 %** telah terealisasi **90.44 %** atau tercapai **102.28 %**

Permasalahan :

- ❖ Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infratsruktur

Tindaklanjut :

- ❖ Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Menyinkronkan dan berkoordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

2. Sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga

Dengan indikator Indeks infrastruktur Bina Marga dari target **79.1%** telah terealisasi **82,76 %** atau tercapai **104,63 %**.

Permasalahan :

Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 251.300 km – 216.689 km = 34.611 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya..

Tindaklanjut :

Diadakan rehabilitasi / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Sasaran 3, yaitu Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Dengan indikator Indeks infrastruktur sumber aya air dari target **98,5 %** telah terealisasi **98,61 %** atau tercapai **100,11 %**.

Permasalahan :

- Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
- Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal

Tindaklanjut :

- Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran dilingkungannya masing-masing
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

4. Sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

Dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target **94,85 %** telah terealisasi **96,91%** atau tercapai **102,17 %**.

Permasalahan :

Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan

Tindaklanjut :

Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

5. **Sasaran 5, yaitu Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi**

Dengan indikator Persentase peran aktif jasa konstruksi dari target **57,75 %** telah terealisasi **80 %** atau tercapai 138,53 %.

Permasalahan :

Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi

Tindaklanjut :

- Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

6. **Sasaran 6, yaitu Meningkatnya Akses Air Minum Yang Layak Melalui SPAM**

Dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem Penyediaan air minum (SPAM) dari target **3,18 %** telah terealisasi **3,61%** atau tercapai **113,52 %**.

Permasalahan :

- Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- Masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi standart baku mutu

Tindaklanjut :

- Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan

7. **Sasaran 7, yaitu Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD**

Dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target **9,82 %** telah terealisasi **10,81 %** atau tercapai **110,08 %**

Permasalahan :

Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik

Tindaklanjut :

- Mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik
- Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola

8. Sasaran 8, yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

- ❖ Dengan indikator *Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi layak dan berkelanjutan* dari target **99.26 %** telah terealisasi **99.616 %** atau tercapai **100.36 %**

Permasalahan :

Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja

Tindaklanjut :

- Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT
 - Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
 - Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbasis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)
- ❖ Dengan indikator *Persentase Rumah tangga berakses Air Minum layak dan berkelanjutan* dari target **98.76 %** telah terealisasi **100 %** atau tercapai **101.26 %**

Permasalahan :

Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas serta keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat

Tindaklanjut :

Regulasi dan penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta pembinaan teknis KPSPAM

9. Sasaran 9, yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Dengan indikator Presentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari target **95.45 %** telah terealisasi **98.70 %** atau tercapai **103.40 %**

Permasalahan :

Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang

Tindaklanjut :

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Sasaran 10, yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target **52,88 %** telah terealisasi **78.75 %** atau tercapai **148.92 %**

Permasalahan :

Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tindaklanjut :

- Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
- Mengoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian tata ruang

11. Sasaran 11, yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target **A (85, 50)** telah terealisasi **A (85,90)** atau tercapai **100,47%**

Permasalahan :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinaspupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (exel) yang mengakibatkan data rawan hilang

- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Tindaklanjut :

- Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal
- Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
- Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
- Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	92.09	1.09
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	100	93.12	1.07
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	89.52	1.12
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	100	97.81	1.02

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	100	86.70	1.15
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	79.65	1.26
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100	92.49	1.08
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	79.65	1.26
	Persentase Rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	92.49	1.08
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	98.47	62.07	1.59
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	78.55	1.27
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	109	96.32	1.13

Pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan **BAIK**, walaupun masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
2. Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 251.300 km – 216.689 km = 34.611 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya
3. Sebagian kontruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan

4. Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
5. Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
6. Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
7. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik
8.
 - a. Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja
 - b. Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas serta keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
9. Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
10. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
11. Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) ii

Daftar Isi 11

Daftar Tabel 13

BAB I PENDAHULUAN 14

 A. Latar Belakang 14

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 15

 C. Maksud dan tujuan 16

 D. Dasar Hukum 17

 E. Aspek – Aspek Strategis 19

 F. Isu – Isu Strategis 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

 A. Rencana Strategis 2021 – 2026 21

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

 A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 26

 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 27

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024 38

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra 49

 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM..... 53

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) 54

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan..... 57

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 57

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 79

C. Prestasi/Penghargaan..... 84

BAB IV PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Langkah Perbaikan 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026	L1
	B. Rencana Kerja Tahun 2024	L2
	C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	L3
	D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	L4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	22
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	23
Tabel 2.3	Program Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	24
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Tahun 2022 – 2024	38
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Akhir Periode Renstra 2021-2026	50
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024	53
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024	55
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2024	57
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	79
Tabel 4.1	Rencana Tindak lanjut dan Time Line pelaksanaan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan, atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) pada hakikatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.

Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahun disusun pelaporannya mulai dari perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP menjadi salah satu kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 dan sekaligus sebagai bahan evaluasi akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota Blitar periode 2021 – 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah terkait kewenangan dan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- j. Pengembangan jasa konstruksi;
- k. Penyelenggaraan penataan ruang;
- l. Penyelenggaraan pertanahan;
- m. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- p. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- s. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian 1 (satu) Seksi dan kelompok jabatan fungsional, sebagaimana struktur organisasi berikut :



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LkjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dan juga sekaligus sebagai bahan evaluasi akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota Blitar periode 2021 – 2024 yang juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah ditargetkan dan bagaimana proses pencapaiannya. Sedangkan tujuan dari penyusunan LkjIP ini adalah memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;

- 26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024
- 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

E. Aspek-Aspek Strategis

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021 – 2026 yaitu : “ KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat “ yang kemudian dituangkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan. Diantara ke 5 (lima) misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mengemban misi yang ke – 4 yaitu “ **Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan** “ . Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang menangani dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sedangkan untuk Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

- 1. *Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 dengan tugas dan fungsi utama sebagai berikut :
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah sebagai berikut ;
 - ❖ Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
 - ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;

- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- ❖ Pengembangan jasa konstruksi;
- ❖ Penyelenggaraan penataan ruang;
- ❖ Penyelenggaraan pertanahan;

2. *Visi Kota Blitar yang membutuhkan sarana-prasarana perkotaan yang cukup besar;*

Berdasarkan aspek-aspek strategis sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. *Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, trotoar, drainase, jaringan irigasi, akses sanitasi layak, akses air minum layak, sarana dan prasarana kota serta bangunan gedung pemerintah;*
- b. *Peningkatan sarana fasilitas kantor pendukung kegiatan;*
- c. *Mengoptimalkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang .*

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :

1. *Penerapan dan pelaksanaan standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umumj yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan penyediaan sanitasi layak*
2. *Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan*
3. *Penguatan sistem jaringan irigasi, saluran drainase, jalan dan bangunan, pelengkap jalan di Kota Blitar*
4. *Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi .*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat daerah pada Khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta *pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar*. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Erat kaitannya dengan pencapaian Visi Kota Blitar, yaitu Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat, yang mengerucut pada Misi Kota Blitar keempat yaitu *Meningkatkan Infrastruktur dan Tata ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan*, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada, serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR						
VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat			MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur bina marga
					Meningkatnya Kualitas	Indeks infrastruktur sumber daya air
					Infrastruktur Sumber Daya Air	
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar
					Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya kelayaknhan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2024 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2024 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	2.691 Indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	79,10 (indeks)
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	98,50 (indeks)
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,85 (%)
5	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	57,75 (%)
6	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,18 (%)
7	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,82 (%)
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di kawasan pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	99.26 (%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,76 (%)
9	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.45 (%)
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,88 (%)
11	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,5) (nilai)

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dijabarkan dalam 11 (sebelas) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	17.967.190.692,18
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.999063.457,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00
4	Program Penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	807.224.600,00
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	152.400.000,00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.650.218.800,00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.472.768.000,00
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.850.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
10	Program Penatagunaan Tanah	4.238.823.000,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.585.495.464,82
JUMLAH		61.607.757.314,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- b. Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria, yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) / Indikator Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	88.42	90.44	102.28
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	79.10	82.76	104.63
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	98.50	98.61	100.11
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94.85	96.91	102.17
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	57.75	80.00	138.53
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.18	3.61	113.52
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9.82	10.81	110.08
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	99.26	99.616	100.36

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98.76	100.00	101.26
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.45	98.70	103.40
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	52.88	78.75	148.92
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,50	A 85,90	100.47
Rata-rata				110.48

Pada tabel tersebut di atas adalah capaian kinerja pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dijabarkan di bawah ini :

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum**

- ❖ Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum , dengan rumus perhitungan 50% Indeks Infrastruktur Bina Marga + 40% Indeks Infrastruktur SDA + 10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya , pada tahun 2024 terealisasi **90.44** dari target **88.42** sehingga tercapai **102.28 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Indeks Infrastruktur Bina Marga	82.76	50% (82.76) + 40% (98.61) + 10% (96.51) = 90.44
❖ Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	98.61	
❖ Indeks Infrastruktur Cipta karya (% gedung sesuai standart + % Drainase dalam keadaan baik + % RT berakses Sanitasi layak dan berkelanjutan + % RT berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan : 4)	(96.91 + 88.08 + 99.616 + 100) : 4 = 96.51	

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
 - Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
 - Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infratsruktur
- ❖ Tindaklanjut :
 - Penambahan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
 - Menyinkronkan dan berkoordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga.

- ❖ Indikator kinerja indeks infrastruktur Bina Marga, dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase jalan dan bangunan pelengkap (trotoar dan saluran) dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2024 terealisasi **82.76** dari target **79.10** sehingga tercapai **104.63%**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jalan dalam kondisi baik	(216.689 km : 251.300 km) x 100 = 86.23	(86.23 + 64.18 + 97.86) : 3 = 82.76
❖ Trotoar (bangunan pelengkap jalan) dalam kondisi baik	(45.015 km : 70.134 km) x 100 = 64.18	
❖ Jembatan dalam kondisi baik	(137 unit : 140 unit) x 100 = 97.86	

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target salah satunya adalah Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta Sinergitas antar stake holder. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;

- ❖ Permasalahan :
Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 251.300 km – 216.689 km = 34.611 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban *overload* yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya.
- ❖ Tindak Lanjut :
Diadakan rehab / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

- ❖ Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase saluran irigasi dan persentase Sumber air dalam kondisi baik, pada tahun 2024 terealisasi **98,61 %** dari target **98.50 %** sehingga tercapai **100,11 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik	(252.038 km : 252.317 km) x 100 = 99.89	(99.89 + 97.33) : 2 = 98.61
❖ Sumber air dalam kondisi baik	(73 unit : 75 unit) x 100 = 97.33	

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target adalah Adanya Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal serta updating terhadap kondisi jaringan irigas. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
 - Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
 - Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal
- ❖ Tindaklanjut :
 - Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran dilingkungannya masing-masing
 - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

- ❖ Indikator kinerja persentase gedung pemerintah sesuai standar dengan rumus perhitungan jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%, pada tahun 2024 telah terealisasi **96,91 %** dari target **94,85 %** sehingga tercapai **102.17 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah bangunan gedung yang sesuai standart	94 unit	94 unit : 97 unit x 100 = 96.91
❖ Jumlah bangunan gedung pemerintah	97 unit	

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong atas keberhasilan ini adalah penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur cipta karya mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- ❖ Tindaklanjut :
Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

5. Sasaran Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi,

- ❖ Indikator kinerja persentase peran aktif jasa konstruksi dengan rumus perhitungan jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%, pada tahun 2024 terealisasi **80.00 %** dari target **57.75 %** sehingga tercapai **138.53 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah Jasa konstruksi yang aktif	72 Badan Usaha	(72 BU : 90 BU) x 100 = 80
❖ Jumlah total jasa konstruksi di Kota Blitar	90 Badan Usaha	

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dengan dukungan adanya Tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakannya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kompetensi jasa konstruksi mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- ❖ Tindaklanjut :
 - Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 - Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

6. Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM,

- ❖ indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2024 terealisasi **3.61 %** dari target **3,18 %** dengan tingkat capaian **113.52%**.

URAIAN		DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga yang memiliki Akses SPAM	rumah yang Akses	6.641 RT	Capaian nilai kumulatif sampai dengan tahun 2023 : 3.13 Capaian kumulatif tahun 2024 : $6.641/52.691 = 0.48$
❖ Jumlah Rumah Tangga	Rumah	52.691 RT	Jadi penghitungannya : $3.13 + 0.48 = 3.61$

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
 - Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
 - Masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi standart baku mutu
 - Belum optimalnya pengelolaan Kapasitas Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan

❖ Tindaklanjut :

- Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan
- Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan Kapasitas Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan

7. Sasaran meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD,

- ❖ Indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2024 terealisasi **10,81 %** dari target **9,82 %** dengan capaian **110.08 %**.

URAIAN	DATA	PENGHITUNGAN
❖ Rumah tangga yang memiliki Akses SPALD	9,383	Capaian nilai kumulatif sampai dengan tahun 2023 = 9.383
❖ Jumlah rumah tangga	1.427	Capaian kumulatif tahun 2024 : 4.349/52.691 = 1.427 Jadi penghitungannya : 9,383 + 1.427 = 10.81

- ❖ Faktor yang menjadi Pendorong tingkat keberhasilan ini dikarenakan Sanitasi merupakan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional . Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi, capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan **Sangat Berhasil**; Penguatan peran masyarakat dalam peran penyediaan dan penyelenggaran santasi
- ❖ Permasalahan :
Belum optimalnya pengolahan air limbah domestik

- ❖ Tindaklanjut :
 - Mengoptimalkan pengolahan air limbah domestik
 - Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola

8. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

- ❖ Indikator Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan Berkelanjutan ,

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	52.489 Rumah Tangga	(52.489 RT : 52.691 RT) x 100 = 99,616
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 Rumah Tangga	

dengan rumus perhitungan Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100% , pada tahun 2024 terealisasi **99.616 %** dari target **99.26 %** sehingga tercapai **100.36 %**.

- Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan Sanitasi merupakan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM , sehingga mendapatkan atribut Sangat Berhasil;
- **Permasalahan :**
Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja
- **Tindaklanjut :**
 - Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT
 - Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
 - Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbasis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)

❖ *Indikator Persentase Rumah tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan*

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	52.691 Rumah Tangga	(52.691 RT : 52.691 RT) x 100 = 100
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 Rumah Tangga	

dengan rumus perhitungan Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100% , pada tahun 2024 terealisasi **100 %** dari target **98.76 %** sehingga tercapai **101.26 %**.

- Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan *Standar Pelayanan Minimal* melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- **Permasalahan :**
 - ✓ Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM perlu diperjelas serta adanya keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
 - ✓ Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- **Tindaklanjut :**
 - ✓ Regulasi penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta Pembinaan teknis KPSPAM
 - ✓ Menoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

- ❖ Indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang , dengan rumus perhitungan Luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan , pada tahun 2024 terealisasi **98.70 %** dari target **95.45 %** sehingga tercapai **103.40 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2024	PENGHITUNGAN
❖ Luas lahan yang sesuai tata ruang	3215.68	(3215.68 : 3258) x 100 = 98.70
❖ Total Luas lahan	3258	

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama Tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
- ❖ Tindaklanjut :
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang,

- ❖ Indikator persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan rumus perhitungan rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun 2024 terealisasi **78.75 %** dari target **52.88 %** sehingga tercapai **148.92 %**.

URAIAN	NILAI	PREDIKAT KINERJA
❖ Persentase Pengaturan Penataan Ruang	82.50	Baik
❖ Persentase Pembinaan penataan ruang	89.81	Baik
❖ Persentase perencanaan tata ruang	75.00	Sedang
❖ Persentase pemanfaatan ruang	71.43	Sedang
❖ Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	75.00	Sedang
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan pelaksanaan Penataan Ruang	78.75	Sedang

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama tim dan koordinasi yang baik , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- ❖ Tindaklanjut :
 - Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
 - Menoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
 - Meningkatkan pelaksanaan pengendalian tata ruang

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah,

- ❖ Dengan rumus perhitungan nilai SAKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2024 memperoleh nilai **A (85,90)** dari target nilai **A (85,50)** atau tercapai **100,47%**.
- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya kinerja perangkat daerah melalui peningkatan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.
- ❖ Permasalahan :
 - Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinaspuvr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
 - Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (exel) yang mengakibatkan data rawan hilang
 - Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
 - Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
 - Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

❖ Tindaklanjut :

- 1. Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal
- 2. Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
- 3. Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
- 4. Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- 5. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Dari uraian capaian kinerja tersebut di atas, rata-rata tingkat keberhasilan dari 11 (sebelas) sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebesar **110.48 %** atau mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Perbandingan capaian tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86.36	86.77	88.42	87.08	88.53	90.44
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76.20	76,40	79.10	77.10	79,05	82.76
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97.00	97,75	98.50	97.00	98,42	98.61

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94.60	94,70	94.85	94.60	94,80	96.91
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	43.48	47,83	57.75	71.60	57,70	80.00
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.45	2,70	3,18	1.51	3,13	3.61
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9.07	9,45	9.82	6.82	9,36	10,81
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96.00	97.00	99.26	98.27	99.216	99.616
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92.00	98.38	98.76	98.38	98.70	100
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.30	95.40	95.45	95.75	95.73	98.70
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40.55	44,63	52.88	57.33	52,83	78.75
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84.43	A 85,00	A 85,50	A 84.21	A 85,48	A 85,90

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa untuk :

1. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86.36	86.77	88.42	87.08	88.67	90.44

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2022 mencapai angka 87.08 melebihi dari target 86.36. Pada tahun 2023 mencapai angka 88.67 mengalami kenaikan sebesar 1.45 poin jika dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 dengan target **88.42** terealisasi **90.44** dan mengalami kenaikan sebesar 1.91 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi **88.53 %**.

Adapun faktor pendukung keberhasilan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- ❖ Adanya peningkatan peran *stakeholder* dalam infrastruktur
- ❖ Partisipasi masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang
- ❖ Adanya peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- ❖ Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan *update database kondisi infratsruktur*

Sebingga tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah :

- ❖ Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Menyinkronkan dan berkoordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

2. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Bina Marga	76.20	76,40	79.10	77.10	79,05	82.76

Indeks Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2022 mencapai angka 77.10. Pada Tahun 2023 Indeks Infrastruktur Bina Marga mencapai 79.05 mengalami kenaikan sebesar 1.95 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Sedangkan pada tahun 2024 realisasi capaian mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 82.76 atau naik 3.71 yang melebihi realisasi dari tahun 2023 yaitu sebesar 79.05

Hal ini dikarenakan adanya Faktor pendukung yaitu :

- ❖ Adanya dukungan dan koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta sinergitas antar stake holder

Sedangkan faktor penghambat Capaian Indeks Infrastruktur Bina Marga adalah :

- ❖ Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 251.300 km – 216.689 km = 34.611 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya

Sehingga tindaklanjut untuk meningkatkan capaian Indeks Infrastruktur Bina Marga adalah sebagai berikut :

- ❖ Diadakan rehab / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97.00	97,75	98.50	97.00	98,42	98.61

Indek Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2022 mencapai angka 97.00. Pada tahun 2023 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air mencapai 98.42 mengalami kenaikan sebesar 1.42 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi capaian mengalami kenaikan sebesar 98.42 atau naik 0.19 yang realisasi capaian kinerjanya melebihi dari tahun 2023 sebesar 98.42

Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung yaitu :

- ❖ Adanya dukungan Adanya Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal serta updating terhadap kondisi jaringan irigasi

Sedangkan faktor penghambat Capaian indeks Infrastruktur Sumber Daya Air adalah :

- ❖ Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan yang menyebabkan rawan kerusakan
- ❖ Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal

Sehingga tindaklanjut untuk meningkatkan Capaian Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan monev pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

4. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94.60	94,70	94.85	94.60	94,80	96.91

Persentase Gedung Pemerintah sesuai Standart pada tahun 2022 mencapai angka 94.60% . Pada Tahun 2023 mencapai 94.80 % yang mengalami kenaikan sebesar 0.20 % jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada tahun **2024** dengan target **94,85 %** terealisasi **96,91 %** dan mengalami kenaikan sebesar 2.11 % jika dibandingkan dengan tahun **2023** yang terealisasi **94,80 %**.

Hal ini disebabkan karena adanya faktor pendukung, antara lain :

- ❖ Tersedianya cukup besar dukungan pemenuhan standar bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah pengguna/pengelola;

Sedangkan faktor penghambat Capaian Presentase gedung Pemerintah sesuai standart adalah :

- ❖ Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan

Sehingga tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan pembangunan rehabilitasi / pemeliharaan gedung

5. Capaian kinerja Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	43.48	47,83	57.75	71.60	57,70	80.00

Persentase Peran Aktif Jasa konstruksi pada tahun 2022 realisasi mencapai 71.60%. Pada tahun 2023 telah teralisasi 57.70% yang mengalami penurunan draktis dalam pencapaian realisasi sebesar 13.90% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2024 dari target **57,75 %** terealisasi **80,00 %** dan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 22.30% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **57,70 %**.

Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung, antara lain :

- ❖ Terselenggaranya peningkatan pelatihan sertifikasi tenaga jasa konstruksi secara rutin, tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya;

Sedangkan faktor penghambat dari indikator Presentase oeran aktif Jasa konstruksi antara lain :

❖ **Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi**

Sehingga tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- ❖ Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

6. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.45	2,70	3,18	1.51	3,13	3.61

Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 1.51 % . Pada tahun 2023 tercapai 3.13 % yang mengalami kenaikan sebesar 1.62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Pada tahun 2024 dari target **3.18 %** mencapai realisasi sebesar **3,61 %** dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023 yang teralisasi **3.13 %**.

Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung, yaitu :

- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan SPM melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat

Sedangkan Faktor penghambat, antara lain :

- ❖ Belum tersedianya tata kelola aset dan belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- ❖ Masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi standart baku mutu
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Sehingga tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Presentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), anta lain sebagai berikut :

- ❖ Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan
- ❖ Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan
- ❖ Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

7. Capaian kinerja Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9.07	9,45	9.82	6.82	9,36	10,81

Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD) pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 6.82%. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 9.36% yang mengalami kenaikan sebesar 2.44% jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan Pada tahun 2024 dengan target 9,82 % terealisasi 10,81 % dan mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi 9,36 %.

Hal ini dikarenakan Sanitasi merupakan standart Pelayanan Minimum dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi priritas nasional dan kepedulian masyarakat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah domestik meningkat, walaupun target tahun 2023 tidak terealisasi;
Sedangkan faktor penghambat antara lain :

- ❖ Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik

Sehingga tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- ❖ Mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik
- ❖ Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola

8. **Capaian kinerja Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman**

- ❖ *Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan,*

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96.00	97.00	99.26	98.27	99.216	99.616

Indikator Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2022 tereralisasi sebesar 98.27% yang melebihi target sebesar 96.00%. Pada tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 99.216 % yang mengalami kenaikan sebesar 0.946 % dibanding realisasi tahun 2022. Pada tahun 2024 dengan target **99.26 %** terealisasi **99.616 %** dan mengalami kenaikan sebesar 0.40% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi **99.216 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Sanitasi merupakan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM
Adapun faktor penghambat dari Indikator Presentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan berkelanjutan adalah :

- Keterbatasannya kesediaan kapasitas IPLT untuk menuju Sanitasi aman
- Keterbatasannya akses untuk penyedotan lumpur tinja

Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT
- Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
- Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbasis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)

❖ *Persentase Rumah tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan,*

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Presentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92.00	98.38	98.76	98.38	98.70	100

Indikator Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan pada tahun 2022 teralisasi 98.38% dari target 92.00%. Pada Tahun 2023 capaian kinerja terealisasi 98.70% dan mengalami kenaikan sebesar 0.32% dari realisasi tahun 2022. Pada tahun 2024 dengan target **98.76 %** terealisasi **100 %** dan mengalami kenaikan sebesar 1.30% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi **98.70 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM

Adapun kendala / faktor penghambat yang dialami yaitu :

- Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas
- Keterbatasannya pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
- Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan

Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- Regulasi dan penataan jaringan perpipaan
- Pembinaan teknis KPSPAM
- Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

9. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.30	95.40	95.45	95.75	95.73	98.70

Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang pada tahun 2022 terealisasi sebesar 95.75%. Pada tahun 2023 capaian kinerja terealisasi sebesar 95.73% melebihi target sebesar 95.40%, walaupun realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.02% dibanding tahun 2022. Pada tahun 2024 dengan target **95.45 %** terealisasi **98.70 %** dan mengalami kenaikan sebesar 2.97% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi **95.73 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama Tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik Adapun faktor penghambat indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

- ❖ Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang

Sehingga tindaklanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan tercapainya kinerja adalah :

- ❖ Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40.55	44,63	52.88	57.33	52,83	78.75

Indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2022 tercapai realisasi sebesar 57.33% . Pada tahun 2023 tercapai 52.83% yang mengalami penurunan capaian realisasi sebesar 4.50%. Pada tahun 2024 dengan target **52.88 %** terealisasi **78.75 %** dan mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi **52.83 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 semakin semakin meningkatnya peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerja sama tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik

Sedangkan faktor penghambat, antara lain :

- ❖ Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Sehingga tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi, adalah sebagai berikut :

- Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
- Menoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian tata ruang

11. Capaian kinerja Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Target			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84.43	A 85,00	A 85,50	A 84.21	A 85,48	A 85,90

Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 terealisasi A (84.21) yang tidak mencapai target sebesar A (84.43) . Pada tahun 2023 nilai SAKIP yang dicapai oleh Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebesar A (85.48) yang melebihi target yang ditetapkan capaian realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 1.27 poin dibandingkan realisasi tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 dengan nilai A (85,90) melebihi target nilai A (85,50) dan mengalami peningkatan sebesar 0.42 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mendapat nilai A (85.48)

Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya beberapa indikator akuntabilitas kinerja yang telah ditentukan

Adapun permasalahan atau faktor penghambat antara lain :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinasupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (exel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Sehingga tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan capaian realiasi adalah sebagai berikut :

- Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal
- Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
- Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
- Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 2024 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan akhir periode
renstra 2021- 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5 = (4/3*100)
Meningkatnya kualitas Insfrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	88.00	90.44	102,77
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	77	82.76	107.48
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	98.61	98.61
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	95	96.91	102.01
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	60,87	80.00	131.43
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,44	3.61	104.94
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10,56	10.81	102.37
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	99.616	99.62
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	100	100
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.55	98.70	103.30
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	58,21	78.75	135.29
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81-90)	A 85.90	100

Adapun Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2024 melebihi target pada akhir periode renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum** pada tahun 2024 terealisasi 90.44 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 88.00 %, hal ini dikarenakan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa.
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga** pada tahun 2024 terealisasi 82.76 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 77 %, hal ini dikarenakan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** pada tahun 2024 terealisasi 96.91 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 95 %, hal ini dikarenakan penanganan pemenuhan standart bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna / pengelola .
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kompetensi Jasa konstruksi** pada tahun 2024 terealisasi 80.00 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 60.87 %, hal ini dikarenakan meningkatnya tertib perizinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksananya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, teapt mutu dan tepat biaya
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Akses Air minum yang layak melalui SPAM** pada tahun 2024 terealisasi 3.61 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 3.44 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jaringan perpipaan air minum baik yang dilakukan oleh Dinas maupun PDAM serta adanya kepedulian masyarakat akan pentingnya akses air minum layak.
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Akses Sanitasi Layak melalui SPALD** pada tahun 2024 terealisasi 10.81 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 10.56 %, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, sinergitas antar stakeholder.
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang** pada tahun 2024 terealisasi 98.70 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 95.55 %, hal ini dikarenakan penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama Tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan Ruang** pada tahun 2024 terealisasi 78.75 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 58.21 %,

hal ini dikarenakan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja serta kerjasama Tim dan adanya koordinasi yang baik.

Sedangkan Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2024 sama dengan target pada akhir periode renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman** pada indikator **Prosentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan** pada tahun 2024 yang realisasinya 100 % sama dengan target pada akhir periode renstra yaitu sebesar 100 %.

Hal ini dikarenakan adanya regulasi dan penataan jaringan perpipaan yang baik serta adanya pembinaan teknis KPSPAM dalam meningkatkan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** pada tahun 2024 terealisasi 85.90 yang sama dengan target pada akhir periode renstra A (81-90) .

Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinasupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (exel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Adapun Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2024 masih dibawah target pada akhir periode renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** pada tahun 2024 terealisasi 98.61 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra 100 %, hal ini dikarenakan sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur

bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan serta banyaknya sampah endapan disaluran irigasi

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman pada Indikator Presentase rumah tangga berakses Sanitasi layak dan berkelanjutan** pada tahun 2024 terealisasi 99.616 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra sebesar 100% hal ini dikarenakan belum seluruhnya rumah tangga terakses sarana sanitasi layak, namun akan dilakukan optimaslisasi pencapaian renstra melalui pembangunan SR secara bertahap.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang menjadi bagian dari SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui dua cara yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2024 dapat dilihat realisasi SPM sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja SPM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98.76	100	101.26
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99.26	99.616	100.36

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, pada Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, indikator *persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan* terealisasi 99.616 % dari target 99.26 % tercapai 100.36 % dan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 99.216 %. Hal ini ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sector. Adapun Tindakan untuk mempertahankan atau meningkatkan meningkatkan pencapaian rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- ❖ Dilaksanakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- ❖ Dilaksanakan sosialisasi yang masif bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak

Sedangkan untuk indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan terealisasi 100 % dari target 98.76 % tercapai 101.26 % dan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 98,70 %, peningkatan ini dapat tercapai karena beberapa faktor pendukung di antaranya :

- ❖ Peran serta BUMD PDAM Perlunya pembagian regulasi pembagian kewenangan
- ❖ Peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM masyarakat);

B. Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan jalan	17.967.190.692,18
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.999.063.457,00
		Program penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00
		Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00
		Program pengembangan Jasa konstruksi	807.224.600,00
Jumlah			45.484.202.049,18
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Program penyelenggaraan jalan	17.967.190.692,18
Jumlah			17.967.190.692,18
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air	11.999.063.457,00
Jumlah			11.999.063.457,00
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Program penataan bangunan gedung	9.748.964.300,00
Jumlah			9.748.964.300,00
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	807.224.600,00
Jumlah			807.224.600,00
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	152.400.000,00
Jumlah			152.400.000,00

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan jalan	17.967.190.692,18
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.999.063.457,00
		Program penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00
		Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00
		Program pengembangan Jasa konstruksi	807.224.600,00
Jumlah			45.484.202.049,18
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3.650.218.800,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	4.961.759.000,00
Jumlah			8.611.977.800,00
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan Pemukiman	Persentase Rumah tangga Berakses Sanitasi layak dan Berkelanjutan	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.650.218.800,00
	Persentase Rumah tangga Berakses Air Minum layak dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	152.400.000,00
Jumlah			3.802.618.800,00
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.472.768.000,00
		Program Penyelenggaraan Sengketa Tanah garapan	23.850.000,00
		Program Penatagunaan tanah	4.238.823.000,00
Jumlah			5.735.4410.000,00
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.472.768.000,00

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan jalan	17.967.190.692,18
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.999.063.457,00
		Program penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00
		Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00
		Program pengembangan Jasa konstruksi	807.224.600,00
Jumlah			45.484.202.049,18
Jumlah			1.472.768.000,00
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	6.585.495.464,82
Jumlah			6.585.495.464,82

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2024 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatn ya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelengg araan jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99.60	99.60	100	17.967.19 0.692,18	16.730.81 0.876,00	93.12
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	99.80	99.80	100			
	Kegiatan Penyelengga raan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan yang dibangun	100	100	100	17,967,19 0,692.18	16,730,81 0,876	93.12
		Persentase jembatan yang	6.12	5.2	84.97			

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
		dipelihara						
		Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	5.09	4.76	93.52			
		Persentase jembatan yang dibangun	100	100	100			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3	3	100	300,000,000.00	297,468,000	99.16
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2	5.001	250.05	7,960,199,843.18	7,181,050,713	90.21
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	80	68	85	230,000,000.00	218,818,000	95.14
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	1	2	200	302,999,919.00	298,803,841	98.62
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20	2	10	1,246,881,186.00	1,243,673,159	99.74
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	1.227	122.7	6,522,109,744.00	6,150,997,595	94.31
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	1	100	1,405,000,000.00	1,339,999,568	95.37
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	98	98	100	11.999.063.457,00	10.741.961.851,00	89.52
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan	1.64	1.64	100	1,999,063,457.00	10,741,961,851	89.52

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	dan Pemeliharaan						
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.346	0.346	100	2,296,040,000.00	2,256,419,900	98.27
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	1	100	4,064,783,063.00	3,881,893,040	95.50
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	2	100	3,761,751,000.00	2,856,898,557	75.95
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	3	100	1,676,489,394.00	1,548,347,154	92.36
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	3	3	100	200,000,000.00	198,403,200	99.20
	Program penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah yang dibangun	91.67	91.67	100	9.748.964.300,00	9.534.982.900,00	97.81
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	91.30	91.30	100			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di</i>	Persentase persetujuan bangunan gedung yang	100	100	100	9,748,964,300.00	9,534,982,900	97.81

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	diterbitkan						
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	9,212,119,300.00	9,103,623,900	98.82
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	3	3	100	536,845,000.00	431,359,000	80.35

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98.00	98.00	100	4.961.759.000,00	4.629.432.000,00	93.30
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	99	99	100	4,961,759,000.00	4,629,432,000	93.30
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	200	200	100	1,259,000,000.00	1,119,226,000	88.90
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	400	400	100	3,225,000,000.00	3,054,557,000	94.71
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3	3	100	117,759,000.00	101,026,000	85.79
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400	425.5	106.38	360,000,000.00	354,623,000	98.51
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	100	100		807.224.600,00	699.882.540,00	86.70
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Prosentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100	100	100	507,188,700.00	416,665,252	

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	106	212	270,813,700.00	250,732,144	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan JasaKonstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	250	370	148	236,375,000.00	165,933,108	94.39
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	60	60	100	300,035,900.00	283,217,288	94.39
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen DATA dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	2	100	300,035,900.00	283,217,288	
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99.60	99.60	100	17.967.190.692,18	16.730.810.876,00	93.12
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	99.80	99.80	100			
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan yang dibangun	100	100	100	17,967,190,692.18	16,730,810,876	93.12
		Persentase jembatan yang dipelihara	6.12	5.2	84.97			
		Persentase jalan yang dipelihara dan	5.09	4.76	93.52			

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
		direhabilitasi						
		Persentase jembatan yang dibangun	100	100	100			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3	3	100	300,000,000.00	297,468,000	99.16
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2	5.001	250.05	7,960,199,843.18	7,181,050,713	90.21
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	80	68	85	230,000,000.00	218,818,000	95.14
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	1	2	200	302,999,919.00	298,803,841	98.62
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20	2	10	1,246,881,186.00	1,243,673,159	99.74
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	1.227	122.7	6,522,109,744.00	6,150,997,595	94.31
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	1	100	1,405,000,000.00	1,339,999,568	95.37
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	98	98	100	11.999.063.457,00	10.741.961.851,00	89.52
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan dan Pemeliharaan	1.64	1.64	100	1,999,063,457.00	10,741,961,851	89.52

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>							
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.346	0.346	100	2,296,040,000.00	2,256,419,900	98.27
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	1	100	4,064,783,063.00	3,881,893,040	95.50
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	2	100	3,761,751,000.00	2,856,898,557	75.95
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	3	100	1,676,489,394.00	1,548,347,154	92.36
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	3	3	100	200,000,000.00	198,403,200	99.20
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah yang dibangun	91.67	91.67	100	9.748.964.300,00	9.534.982.900,00	97.81
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	91.30	91.30	100			

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100	100	100	9,748,964,300.00	9,534,982,900	97.81
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	3	3	100	536,845,000.00	431,359,000	80.35
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	100	100	100	807.224.600,00	699.882.540,00	86.70

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	Prosentage tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100	100	100	507,188,700.00	416,665,252	82.15
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	106	212	270,813,700.00	250,732,144	92.58
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	250	370	148	236,375,000.00	165,933,108	70.20
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	60	60	100	300,035,900.00	283,217,288	94.39
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen DATA dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	2	100	300,035,900.00	283,217,288	94.39
Meningkatnya Akses Air Minum yang layak melalui SPAM	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	90.00	90.00	100	152.400.000,00	121.382.000,00	79.65
	<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem</i>	Persentase SPAM yang terbangun	78.95	78.95	100	152,400,000.00	121,382,000	79.65

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</i>							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	1	100	152,400,000.00	121,382,000	79.65
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan yang ditingkatkan	1	1	100	--	--	--
Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air limbah domestik	Persentase SPALD dalam kondisi baik	84.00	84.00	100	3.650.218.800,00	3.376.072.696,00	92.49
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SPALD yang terbangun	78.95	78.95	100	3,650,218,800.00	3,376,072,696	92.49
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	20	20	100	459,786,700.00	425,995,116	92.65
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan air limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala pemukiman yang dibangun	10	10	100	522,324,000.00	522,324,000.00	100

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200	200	100	814,649,200.00	730,025,260	89.61
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standart	80	80	100	1,512,000,000.00	1,494,000,000	98.81
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10	10	100	85,818,900.00	53,995,500	62.92
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang Disusun	1	1	100	255,640,000.00	149,732,820	58.57
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98.00	98.00	100	4.961.759.000,00	4.629.432.000,00	93.30
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	99	99	100	4,961,759,000.00	4,629,432,000	93.30

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	200	200	100	1,259,000,000.00	1,119,226,000	88.90
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	400	400	100	3,225,000,000.00	3,054,557,000	94.71
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3	3	100	117,759,000.00	101,026,000	85.79
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400	425.5	106.38	360,000,000.00	354,623,000	98.51
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan Pemukiman	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	90.00	90.00	100	152.400.000,00	121.382.000,00	79.65
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SPAM yang terbangun						
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	1	100	152,400,000.00	121,382,000	79.65

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan yang ditingkatkan	1	1	100	0	0	0
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air limbah domestik	Persentase SPALD dalam kondisi baik	84.00	84.00	100	3.650.218.800,00	3.376.072.696,00	92.49
Meningkatnya kualitas Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	86.84	86.84	100	1.472.768.000,00	1.156.853.318,00	78.55
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2	2	100	652,283,500.00	472,914,424	72.50
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	1	1	100	75,000,000.00	74,481,000	99.31
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	1	100	326,561,500.00	212,303,383	65.01
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4	4	100	125,995,000.00	119,092,795	94.52

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	1.5	150	124,727,000.00	67,037,246	53.75
	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	100	100	100	349,360,000.00	273,055,240	78.16
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500	165	33	99,360,000.00	98,608,750	99.24
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	1	100	150,000,000.00	99,798,990	66.53
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	umlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	1	100	100,000,000.00	74,647,500	74.65
	<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	10.59	10.75	101.51	471,124,500.00	410,883,654	87.21
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	4	100	159,566,500.00	144,117,654	90.32

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1	1	100	76,098,000.00	75,558,000	99.29
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	12	12	100	75,460,000.00	37,175,000	49.26
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	4	4	100	160,000,000.00	154,033,000	96.27
	Program Penyelenggaraan Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	23.850.000,00	8.320.000,00	34.88
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	100	100	100	23,850,000	8,320,000	34.88
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	23,850,000	8,320,000	34.88
	Program Penatagunaan tanah	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Bersertifikat	98.00	93.51	95.42	4.238.823.000,00	3.084.746.153,00	72.77
	Kegiatan Penggunaan	Persentase Dokumen	98	100	102.04	4,238,823,000	3,084,746,153	72.77

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Pertanahan yang Tersusun						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	100	100,000,000	99,789,000	99.79
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	4,138,823,000	2,984,957,153	72.12
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	86.84	86.84	100	1.472.768.000,00	1.156.853.318,00	78.55
	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2	2	100	652,283,500.00	472,914,424	72.50
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	1	1	100	75,000,000.00	74,481,000	99.31
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan	1	1	100	326,561,500.00	212,303,383	65.01

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
		RTRW Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4	4	100	125,995,000.00	119,092,795	94.52
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	1.5	150	124,727,000.00	67,037,246	53.75
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	100	100	100	349,360,000.00	273,055,240	78.16
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500	165	33	99,360,000.00	98,608,750	99.24
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	1	100	150,000,000.00	99,798,990	66.53
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	umlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	1	100	100,000,000.00	74,647,500	74.65
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	10.59	10.75	101.51	471,124,500.00	410,883,654	87.21

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>							
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	4	100	159,566,500.00	144,117,654	90.32
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1	1	100	76,098,000.00	75,558,000	99.29
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	12	12	100	75,460,000.00	37,175,000	49.26
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	4	4	100	160,000,000.00	154,033,000	96.27
Meningkatnya Kinerja Perangkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 82.8	A 90.25	109	6.585.495.464,82	6.343.248.972,00	96.32
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	52,096,322.00	51,720,530	99.28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	100	7,256,322.00	7,143,500	98.45
	Koordinasi	Jumlah Laporan	1	1	100	44,840,00	44,577,03	99.41

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	4,761,846,996.00	4,590,267,255	96.40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	100	4,759,599,156.00	4,588,097,255	96.40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	100	2,247,840.00	2,170,000	96.54
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	100	100	100	181,093,814.00	178,848,700	98.76
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100	87,069,314.00	86,099,700	98.89
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	60	60	100	94,024,500.00	92,749,000	98.64

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Undangan						
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	381,519,791.39	377,375,027	98.91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100	14,312,241.00	14,062,000	98.25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	11	100	34,998,560.39	34,881,400	99.67
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100	4,783,490.00	4,687,000	97.98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100	58,961,000.00	58,728,200	99.61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		20,783,500.00	20,781,075	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24		7,200,000.00	4,580,000	63.61
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	80		195,506,000.00	195,005,352	99.74
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	44,975,000.00	44,650,000	99.28
	<i>Kegiatan Pengadaan</i>	Persentase penyediaan	100	100	100	349,235,625.43	347,262,600	99.44

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan						
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32	32	100	128,406,581.00	127,971,300	99.66
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	8	100	220,829,044.43	219,291,300	99.30
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	388,279,536.00	349,542,790	90.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	100	8,403,536.00	87,328,702	88.75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104	104	100	289,876,000.00	262,214,088	90.46
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	471,423,380.00	448,232,070	95.08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	100	177,625,380.00	160,359,570	90.28
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39	39	100	9,828,000.00	9,750,000	99.21
	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	20	20	100	70,594,00	70,500,00	99.87

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
	dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100	175,000,000.00	169,876,800	97.07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100	38,376,000.00	37,745,700	98.36

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	100	92.09	1.09
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	100	93.12	1.07
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	89.52	1.12
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	100	97.81	1.02
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	100	86.70	1.15

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	79.65	1.26
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100	92.49	1.08
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	79.65	1.26
	Persentase Rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	92.49	1.08
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	98.47	62.07	1.59
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	78.55	1.27
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	109	96.32	1.13

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, tingkat efisiensi sebesar 1,09%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 92.09% dari total pagu anggaran Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur
- ❖ Adanya peran aktif masyarakat dalam musrenbang
- ❖ Peningkatan kualitas Pekerjaan dari penyedia jasa

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga

Dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Bina Marga tingkat efisiensinya sebesar 1.07 %, bahwa dengan capaian kinerja 100 % membutuhkan anggaran sebesar 93.12 % dari total pagu anggaran penyelenggaraan jalan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan Faktor Pendukung antara lain :

- ❖ Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam mempercepat capaian kinerja serta sinergitas antar stake holder
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Kerjasama Tim yang solid

3. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air tingkat efisiensinya sebesar 1,12 % bahwa dengan capaian kinerja 100 % membutuhkan anggaran sebesar 89.52% dari total pagu anggaran pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Adanya monitoring dan evaluasi yang terjadwal serta updating terhadap kondisi jaringan irigasi
- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung Pencapaian Kinerja,
- ❖ Koordinasi yang baik

4. Sasaran 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

Dengan indikator kinerja Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar tingkat efisiensinya sebesar 1,02%, bahwa dengan capaian kinerja 100 % membutuhkan anggaran sebesar 97.81% dari total pagu anggaran pengelolaan bangunan gedung.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Terselenggaranya bangunan Gedung pemerintah yang memenuhi standart
- ❖ Penanganan pemenuhan standart bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna / pengelola

5. Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi

Dengan indikator kinerja Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi tingkat efisiensi sebesar 1,15%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 86.70% dari total pagu anggaran pembinaan jasa konstruksi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peran serta Badan Usaha dalam proses perijinan Jasa konstruksi
- ❖ Tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- ❖ Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu , tepat mutu dan tepat biaya

6. Sasaran 6 yaitu Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM

Dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tingkat efisiensi sebesar 1,26%, bahwa dengan capaian kinerja 100 % membutuhkan anggaran sebesar 79.65 % dari total pagu anggaran pengelolaan sistem penyediaan air minum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan SPM melalui penyediaan air minum bagi masyarakat
- ❖ Sarana dan prasarana yang memadai
- ❖ Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung untuk Pencapaian Kinerja

7. Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD dengan indikator

kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tingkat efisiensi sebesar 1,08%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 92.49 % dari total pengelolaan air limbah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**, dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder terkait;

8. Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

Dengan indikator *Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan* , tingkat efisiensi sebesar 1,26%, bahwa dengan capaian kinerja 100%

membutuhkan anggaran sebesar 79.65 % dari total pagu anggaran Pengelolaan Air Limbah . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Sanitasi merupakan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM ,

Dengan indikator *Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan* , tingkat efisiensi sebesar 1,08 % , bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 92.49 % dari total pagu anggaran Penyediaan air minum . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM ,

9. Sasaran 9 yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Dengan indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang , tingkat efisiensi sebesar 1,59% , bahwa dengan capaian kinerja 98.47% membutuhkan anggaran sebesar 62.07% dari total pagu anggaran Penataan Ruang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja
- ❖ Kerjasama tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik ,

10. Sasaran 10 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, tingkat efisiensi sebesar 1,27% , bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 78.55% dari total pagu anggaran penyelenggaraan tata ruang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja ,
- ❖ Meningkatnya peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Kerjasama Tim,
- ❖ Koordinasi yang baik

11. **Sasaran 11 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensi sebesar 1,13%, bahwa dengan capaian kinerja 109% membutuhkan anggaran sebesar 96.32% dari total pagu anggaran penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan,
- ❖ Fasilitasi kantor yang memadai,
- ❖ Anggaran yang tersedia

C. Prestasi/Penghargaan

- ❖ Selama tahun 2024 tidak ada prestasi/penghargaan skala nasional maupun regional yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Blitar, namun pada tahun 2023 telah direalisasikan preservasi jalan di 7 (tujuh) ruas jalan kota dengan lokasi sebagai berikut :

1. Jl. Cokroaminoto sepanjang 0.282 km
2. Jl. Dr. Wahidin sepanjang 1,243 km
3. Jl. Bromo sepanjang 0,152 km
4. Jl. Raung sepanjang 0.218 km
5. Jl. Jati sepanjang 1.071 km
6. Jl. Widuri sepanjang 1.395 km
7. Jl. Kelapa Gading sepanjang 1.057 km

melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.

(*Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Kelapa Gading Kota Blitar CS antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Kota Blitar Nomor : 6671/BA/Bb8.7/2023*)

- ❖ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Kontributor penerimaan terbesar Wajib Pajak Instansi Pemerintah Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum** dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari target 88.42 % terealisasi 89.63 % atau tercapai 101.37 %.
2. Sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga** dengan indikator indeks infrastruktur Bina Marga dari target 79.10% telah terealisasi 82.76 % pada tahun 2024 atau tercapai 104.63%.
3. Sasaran 3 yaitu **Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan indikator indeks infrastruktur sumber daya air dari target 98.50% telah terealisasi 98,61% atau tercapai 100,11%.
4. Sasaran 4 yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 94.85% terealisasi 96.91% atau tercapai 102.17%.
5. Sasaran 5 yaitu **Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi** dengan indikator persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 57.75 % terealisasi 80.00 % atau tercapai 138.53 %.
6. Sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem penyediaan air minum (SPAM) dari target 3.18 % terealisasi 3,61% atau tercapai 113.52 %.
7. Sasaran 7 yaitu **Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target 9,82% terealisasi 10.81% atau tercapai 110.08%.

8. Sasaran 8 yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman dengan indikator :
 - ❖ Presentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan dari target 99.26 % terealisasi 99.616 % atau tercapai 100.36 %.
 - ❖ Presentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan dari target 98.76 % terealisasi 100 % atau tercapai 101.26 %.
9. Sasaran 9 yaitu **Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang** dengan indikator Presentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari target 95.45 % terealisasi 98.70 % atau tercapai 103.40 %.
10. Sasaran 10 yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target 52.88% terealisasi 78.75% atau tercapai 148.92%.
11. Sasaran 11 yaitu **Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A (85.50) terealisasi A (85,90) atau tercapai 100.47%.

Pada Tahun 2024 Alokasi Pagu Anggaran untuk Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebesar Rp. 61.607.757.314,- (*Enam puluh satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.683.991.576 (*Lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau sebesar 92.01 %. Mengacu pada capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 maka efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024 sebesar **1,09**.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan **BAIK**, walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya :

1. Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
2. Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 251.300 km – 216.689 km = 34.611 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya

3. Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
4. Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
5. Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
6. Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
7. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik
8. a. Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja
- b. Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas serta keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
9. Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
10. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
11. Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

B. Langkah Perbaikan

Dalam menghadapi permasalahan diatas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

1. Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
2. Diadakan rehabilitasi / pemeliharaan jalan serta koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan
3. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
4. Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

5. Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
7. Mengoptimalkan pengolahan air limbah domestik
8.
 - a. Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
 - b. Regulasi dan penataan kewenangan pengeloan jaringan perpipaan air minum serta pembinaan tekhnis KPSPAM
9. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan
10. Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
11. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak lanjut dan Time Line Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
1	Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum	Mengalokasikan anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum	Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan : ❖ Penyelenggaraan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
			Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
2	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan serta koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan	Pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin jalan dan rehabilitasi jalan	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pemeliharaan berkala jalan ❖ Rehabilitasi jalan ❖ Pemeliharaan Rutin Jalan	√	√	√
3	Pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan	Pembangunan, peningkatan serta operasi dn pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan ❖ Peningkatan jaringan irigasi permukaan ❖ Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	√	√	√
4	Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta	Monev pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitasi	Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
	secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung	umum	Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
5	Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Kota Blitar	Prgram : Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan : ❖ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	√	√	√
6	Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pemakaian jaringan perpipaan yang komunal / PDAM	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
7	Mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja , Pembangunan SPALD Terpusat, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja , serta pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman ❖ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	√	√	√
8.a.	Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)	Penyempurnaan Aplikasi jasa penyedotan lumpur tinja	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	√	√	√
8.b.	Regulasi dan penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta	Pembinaan teknis KPSPAM	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
	pembinaan tekhnis KPSPAM		Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
9	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Program : Penyelenggaraan penataan Ruang Kegiatan : ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	√	√	√
10	Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR	Melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR	Program : Penyelenggaraan penataan Ruang Kegiatan : ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
11	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	--	√	√

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Ir. ERNA SANTI, M. T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2024				2020	2024				
										Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung		
										Peningkatan ketersediaan bangunan gedung	Peningkatan ketersediaan bangunan gedung		
										Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota		
											Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota		
											Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi	
											Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi		
											Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi		

TUJUAN					SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			AWAL 2020	TARGET 2024				AWAL 2020	TARGET 2024						
					Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	95.14	99.26	Optimalisasi pengelolaan air limbah pengembangan dan pengelolaan IPAL	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL				
						Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	89.37	98.76				Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	
					Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	95.30	95.45	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang				
										Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang					
										Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang					

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			

Bitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. ERNA SANTI, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	79,10%	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,60							17,967,190,692.18
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,80							
							Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	5,09				17,967,190,692.18
								Persentase jembatan yang dibangun	100,00				
								Persentase jembatan yang dipelihara	6,12				
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3	300,000,000.00
										Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	6,522,109,744.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
											Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2	7,960,199,843.18
											Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	1,405,000,000.00
											Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20	1,246,881,186.00
											Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	4	189,999,999.00
											Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	302,999,919.00
											Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	80	230,000,000.00
2	Meningknya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	98.50%	Program pengelolaan sumber daya air	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	98.00								11,999,063,457.00
											Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan dan Pemeliharaan	1.64	1,999,063,457.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
										Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.346	2,296,040,000.00	
										Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.00	4,064,783,063.00	
										Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.00	3,761,751,000.00	
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.00	1,676,489,394.00	
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	2.00	200,000,000.00	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta karya	Presentase Gedung Pemerintah Sesuai Standart	94.85%	Program penataan bangunan gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	91.67							9,748,964,300.00	
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	91.3								

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN	
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase penyelenggaraa n bangunan gedung	100.00				9,748,964,300.00	
											Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	3.00	9,212,119,300.00

[illegible]

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50.00	270,813,700.00
							Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan JasaKonstruksi		250.00	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			236,375,000.00
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPIAKI	60				300,035,900.00
										Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DATA dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2.00	300,035,900.00
5	Meningkatnya Akses Air minum yang layak melalui SPAM	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.18%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	90.00							152,400,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	78.95				152,400,000.00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1.00	152,400,000.00
										Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan yang ditingkatkan	1.00	0.00
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak melalui SPALD	Presentase rumah tangga yang memiliki Akses Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9.82%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	84.00							3,650,218,800.00
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	78.95				3,650,218,800.00
										Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (IPLT)	Jumlah instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	20	459,786,700.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan air limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala pemukiman yang dibangun	10	522,324,000.00
										Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200	814,649,200.00
										Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standart	80	1,512,000,000.00
										Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10	85,818,900.00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang Disusun	1	255,640,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98.00							4,961,759,000.00
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	99.00				4,961,759,000.00
										Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	200	1,259,000,000.00
										Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	400	3,225,000,000.00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3	117,759,000.00
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400	360,000,000.00
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	52.88	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan Dokumen Tata Ruang	86.84							1,472,768,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2.00				652,283,500.00
							Penetapan Kebijakan dalam rangkaPelaksanaan Penataan Ruang			Jumlah dokumen kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota		1	75,000,000.00
							Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1	326,561,500.00
							Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		4	125,995,000.00
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang		1	124,727,000.00
							Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	100.00				349,360,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500	99,360,000.00
										Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	150,000,000.00
										Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	100,000,000.00
							Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	10.59				471,124,500.00
										Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	159,566,500.00
										Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1	76,098,000.00

[illegible]

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	100,000,000.00
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	4,138,823,000.00
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	85.50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.80							6,585,495,464.82
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.80	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100.00				52,096,322.00
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,256,322.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	87,069,314.00
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			94,024,500.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar					381,519,791.39
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			14,312,241.00
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			34,998,560.39
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4,783,490.00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			58,961,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	20,783,500.00
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		24	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			7,200,000.00
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			195,506,000.00
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			44,975,000.00
													349,235,625.43
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100.00				
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32	128,406,581.00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	220,829,044.43
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100.00				388,279,536.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	8,403,536.00
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		104		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		289,876,000.00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100.00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	471,423,380.00
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
							Pemeliharaan Mebel		39		Jumlah Mebel yang Dipelihara		9,828,000.00
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70,594,000.00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		175,000,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	38,376,000.00

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar



Ir. ERNA SANTI, MT

Perbina Utama Muda

NIP. 19670516 199803 2 004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ERNA SANTI, M. T
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

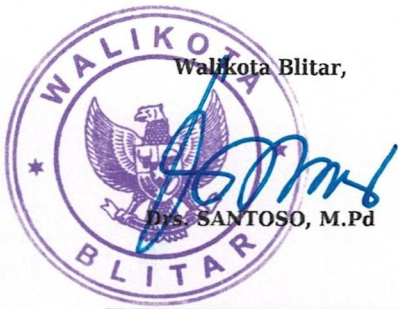
Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar,

Ir. ERNA SANTI, M. T
Pemuda Utama Muda
NIP. 196705161998032004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.45(%)
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	99.26(%)
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98.76(%)
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	88.42(Indeks)
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	52.88(%)
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik (SPALD)	9.82(%)
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.18(%)
7	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	79.10(Indeks)
8	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	57.75(%)
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	98.50(Indeks)
10	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94.85(%)
11	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,472,768,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	807,224,600.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17,967,190,692.18	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	4,238,823,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9,748,964,300.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,961,759,000.00	Insentif Fiskal
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,650,218,800.00	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
8	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	23,850,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	152,400,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,999,063,457.00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi Hasil
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,585,495,464.82	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi Hasil
Total:		61,607,757,314.00	



PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitar
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dan bangunan pelengkap (trotoar dan saluran) dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik	79.10	82.76	104.63		Program penyelenggaraan jalan	17,967,190,692.18	16,730,810,876.00	93.12	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran irigasi dan persentase Sumber air dalam kondisi baik	98.5	98.61	100.11		Program pengelolaan sumber daya air	11,999,063,457.00	10,741,961,851.00	89.52	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	94.85	96.91	102.17		Program penataan bangunan gedung	9,748,964,300.00	9,534,982,900.00	97.81	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%,	57.75	80.00	138.53		Program pengembangan jasa konstruksi	807,224,600.00	699,882,540.00	86.70	
5	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%	3.18	3.61	113.52		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	152,400,000.00	121,382,000.00	79.65	
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%	9.82	10.81	110.08		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3,650,218,800.00	3,376,072,696.00	92.49	
								Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	4,961,759,000.00	4,629,432,000.00	93.30	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	52.88	78.75	148.92		Program penyelenggaraan penataan ruang	1,472,768,000.00	1,156,853,318.00	78.55	
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	nilai SAKIP perangkat daerah	A 85.50	A 85,90	100.47		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	6,585,495,464.82	6,343,248,972.00	96.32	
SASARAN RPJMD												
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	88.42	90.44	102.28						
2	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	95.45	98.70	103.40						
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	99.26	99.616	100.36						

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	98.76	100.00	101.26						
TUJUAN RPJMD												
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	70 % Indeks Infrastruktur PU + 30% level of service	58.47	63.59	108.76						

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kota Blitar



I. ERNA SANTI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199803 2 004